

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERN ASET TETAP  
PADA DINAS PUPR-PKP PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI PAPUA**



**DIAJUKAN OLEH:**

**SATYA ADIE PRATAMA**

**NIM. 126231143**

**PROGRAM STUDI PROFESI AKUNTAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2024**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERN ASET TETAP  
PADA DINAS PUPR-PKP PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI PAPUA**



**DIAJUKAN OLEH:  
SATYA ADIE PRATAMA  
NIM. 126231143**

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT  
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN  
PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS PENGENDALIAN INTERN ASET TETAP**  
**PADA DINAS PUPR-PKP PEMERINTAH DAERAH**  
**PROVINSI PAPUA**

**Laporan Tugas Akhir**

**Disusun Oleh:**



**Satya Adie Pratama**

**126231143**

**Disetujui oleh:**  
**Pembimbing**



**F.X. Kurniawan Tjakrawala, S.E., M.Si., Ak., CA.**

## ABSTRAK

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari tentang sistem pengendalian internal pengelolaan aset yang dijalankan oleh DPUPR-PKP Provinsi Papua. Penilaian kinerja pengelolaan aset tersebut dinilai dengan metode SPI COSO sesuai dengan PP No 60 Tahun 2008. Hasil analisis data tersebut didapat dari pengisian kuisioner yang dilakukan oleh pengurus barang Dinas PUPR-PKP dan divalidasi oleh kepala DPUPR-PKP, wawancara dan observasi serta dokumentasi. Penelitian dilaksanakan dengan metode kualitatif deskriptif. Hal yang akan ditinjau diantaranya terkait dengan Lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Dari hasil penelitian SPI pengelolaan aset menunjukkan bahwa masih dapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan aset. Kelemahan yang terjadi diantaranya belum adanya prosedur syarat minimal kompetensi bagi pegawai yang menduduki posisi sebagai pengurus barang, belum adanya mekanisme dalam mengantisipasi pergantian personil yang bertanggung jawab sebagai pengurus barang sehingga terdapat aset yang tidak dapat ditelusuri karena kurangnya data dan informasi. Masih ditemukannya kelemahan dalam pengendalian pengolahan informasi dan pengendalian fisik atas aset. Masih ditemukannya kesalahan dalam pencatatan transaksi yang dikategorikan sebagai aset tetap dikarenakan salah penganggaran dan kurangnya informasi serta masih ditemukannya beberapa rekomendasi audit eksternal oleh BPK yang belum ditindaklanjuti oleh Dinas PUPR. Dari analisis terhadap pengendalian internal yang disusun beserta implementasinya, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pengelolaan aset Dinas PUPR-PKP belum sepenuhnya efektif.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, efektif, COSO.

## ABSTRACT

An asset is an economic resource controlled and/or owned by the Government as a result of past events and from which future economic and/or social benefits are expected to be obtained, both by the government and the public, and can be measured in monetary terms. This includes non-financial resources required for the provision of services to the general public and resources maintained for historical and cultural reasons.

This research aims to understand and study the internal control system for asset management implemented by Dinas PUPR-PKP of Papua Province. The performance evaluation of asset management is assessed using the COSO Internal Control-Integrated Framework method in accordance with PP No. 60 of 2008. The data analysis results were obtained from questionnaires completed by the asset managers of the DPUPR-PKP and validated by the head of DPUPR-PKP, as well as through interviews, observations, and documentation. The research was conducted using a descriptive qualitative method. The aspects reviewed include the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring.

The results of the internal control system for asset management indicate that there are still several weaknesses in asset management. The weaknesses identified include the absence of minimum competency requirement procedures for employees holding positions as asset managers, and the lack of mechanisms to anticipate the turnover of personnel responsible for managing assets, resulting in assets that cannot be traced due to insufficient data and information. Weaknesses were also found in the control of information processing and physical control over assets. Errors were found in the recording of transactions categorized as fixed assets due to budgetary mistakes and lack of information, and there were still several external audit recommendations by BPK that had not been followed up by the Dinas PUPR. From the analysis of the internal control system and its implementation, it can be concluded that the internal control system for asset management in the Dinas PUPR-PKP has not been fully effective.

**Key words:** Internal Control System, effective, COSO.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara. Selama pengerjaan karya akhir ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
2. Dr. Sawidji Widodoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
4. F.X. Kurniawan Tjakrawala S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberi arahan dan masukan kepada penulis selama penulisan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna namun penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dari berbagai pihak.

Jakarta, 8 May 2024

Satya Adie Pratama

## DAFTAR ISI

<b>1 HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>ix</b>
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Manfaat.....	2
1.4 Objek Penelitian .....	3
<b>BAB II STUDI PUSTAKA.....</b>	<b>4</b>
2.1 Gambaran Umum Teori.....	4
2.2 Kerangka Penelitian.....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>19</b>
4.1 Lingkungan Pengendalian .....	19
4.2 Penilaian Resiko .....	23
4.3 Aktivitas Pengendalian.....	24
4.4 Informasi dan Komunikasi .....	26
4.5 Pemantauan.....	27
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>28</b>
5.1 Kesimpulan.....	28
5.2 Saran .....	29
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>31</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Saldo Aset yang akan Diserahkan per 31 Desember 2022.....	2
Tabel 2.1 Konsep dan Prinsip Sistem Pengendalian Internal.....	11
Tabel 4.1 Kesimpulan Hasil Analisis SPI Coso pada Dinas PUPR PKP Pemerintah Daerah Provinsi Papua.....	16



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Kerangka lima komponen pengendalian internal COSO.....	9
Gambar 2. Kerangka penelitian Sistem Pengendalian Internal.....	17

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah merupakan sebuah bentuk tatanan organisasi yang mencakup segala bidang yang berhubungan dengan masyarakat. Dalam tatanan organisasi dan semua kegiatan operasional dalam Urusan Pemerintahan membutuhkan suatu Sistem Pengendalian Internal (SPI) sehingga penyelenggaraan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan tertib, terkendali, efisiensi dan efektif dalam pelaporan pengelolaan keuangan secara handal, mengamankan aset dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.

Pada tanggal 25 Juli 2022 telah disahkan tiga Undang-Undang (UU) terkait pembentukan provinsi baru di Papua, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Tengah, dan Undang-Undang 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah Papua bersama Pemerintah Daerah Otonomi Baru (DOB) salah satunya mengatur tentang pelaksanaan penyerahan BMD Provinsi Papua kepada Pemerintah DOB baik yang bergerak dan tidak bergerak salah satunya Aset Tetap. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh

pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2022 dan 2023 (S.d Semester I) pada Pemerintah Provinsi Papua di Jayapura, Pemerintah Provinsi Papua memiliki Saldo Persediaan yang akan Diserahkan ke DOB per Desember 2022 senilai Rp962.010.008,19 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Rincian Saldo Aset yang akan Diserahkan per 31 Desember 2022**

No.	SKPD	Jumlah Barang	Nilai (Rp)	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dinas PUPR-PKP	61	923.866.559.371,72	96,03
2	Dinas Kesehatan	2	6.022.377.938,47	0.63
3	Dinas Perhubungan	8	31.561.352.698,00	3.28
4	Dinas Olahraga dan Pemuda	3	577.720.000,00	0.06
<b>Jumlah</b>		<b>74</b>	<b>962.028.010.008,19</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Jayapura TA 2019-2023*

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Dinas PUPR-PKP memiliki saldo persediaan yang akan diserahkan per 31 Desember 2022 dengan bobot terbesar yaitu 96,03% sebesar Rp 923.866.559.371,72. Mengacu pada angka ini, penulis ingin menganalisis Pengendalian intern Aset tetap pada Dinas PUPR-PKP Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

## 1.2 Tujuan

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk:

1. Mempelajari dan mengetahui pengendalian intern Aset tetap pada Dinas PUPR-PKP Pemerintah Daerah Provinsi Papua; dan
2. Bagaimana kinerja dari sistem pengendalian internal pengelolaan Aset yang dijalankan Dinas PUPR-PKP Provinsi Papua ditinjau dengan COSO.

## 1.3 Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Dinas PUPR-PKP dapat menyediakan informasi mengenai kelemahan dari sistem pengendalian intern.
2. Hasil dan pembahasan penulisan tugas akhir diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran, dan ilmu pengetahuan kepada pihak lain yang berkepentingan.

#### **1.4 Objek Penelitian**

Objek Penelitian yang diambil penulis adalah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR-PKP)

## DAFTAR PUSTAKA

- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2013. *Internal Control – Integrated Framework*. New York: AIGPA's Publication Division.
- Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/76/TAHUN 2023 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengurus Barang Milik Daerah dan Atasan Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Jayapura.
- Marshall B. Romney, Paul John Steinbart. 2018. *Accounting Information System* Fouteenth edition Pearson Education Limited.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Berita Negara Republik Indonesia, Jakarta.